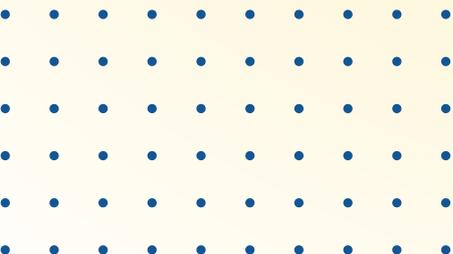


PENETAPAN



KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pemerintah Kota Malang



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

Nomor: 900.1.1/5073/35.73.503/2024
Nomor: 900.1.1/111/35.73.200/2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.
Jabatan : Pj. Walikota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1 Malang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Malang.
2. a. Nama : AMITHYA RATNANGGANI SIRRADUHITA, SS
Jabatan : Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1A Malang
b. Nama : H. ABDURROHMAN, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1A Malang
c. Nama : TRIO AGUS PURWONO, S.TP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1A Malang
d. Nama : RIMZAH, S.IP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1A Malang
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Malang, 15 November 2024

Pj. WALIKOTA MALANG,

IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MALANG
Ketua,

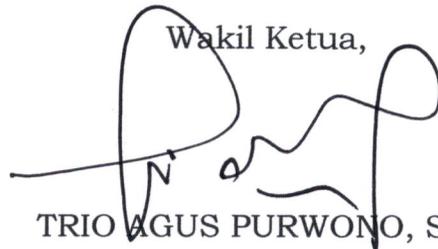
AMITHYA RATNANGGANI SIRRADUHITA, SS

Wakil Ketua,



H. ABDURROHMAN, S.H.

Wakil Ketua,



TRIO AGUS PURWONO, S.T.P.

Wakil Ketua,



RIMZAH, S.IP.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG**

**Nomor: 900.1.1/5075/35.73.503/2024
Nomor: 900.1.1/113/35.73.200/2024**

**TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.
Jabatan : Pj. Walikota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1 Malang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Malang.
2. a. Nama : AMITHYA RATNANGGANI SIRRADUHITA, SS
Jabatan : Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1A Malang
b. Nama : H. ABDURROHMAN, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1A Malang
c. Nama : TRIO AGUS PURWONO, S.TP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1A Malang
d. Nama : RIMZAH, S.IP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jalan Tugu Nomor 1A Malang
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Dengan ini menyatakan terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang tidak terdapat dalam RKPD Kota Malang Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

maka pada hari ini Jum'at tanggal 15 bulan November tahun 2024, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Malang, 15 November 2024

Pj. WALIKOTA MALANG,



IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MALANG



Ketua,

AMITHYA RATNANGGANI SIRRADUHITA, SS

Wakil Ketua,

H. ABDURROHMAN, S.H.

Wakil Ketua,

TRIO AGUS PURWONO, S.T.P

Wakil Ketua,

RIMZAH, S.IP.

LAMPIRAN

Berita Acara Kesepakatan Nomor 900.1.1/5075/35.73.503/2024 Tanggal 15 November 2024
 900.1.1/113/35.73.503/2024

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
1	1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- APK SD - Jumlah Lembaga Kursus yang menyelenggarakan Teaching Factory - Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif - Persentase satuan PKBM yang terakreditasi - Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Industri - APM SMP	- 100 % - 11 % - 70 % - 75 % - 8 % - 86 %											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	- APK, APM SD - [deleted] - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	- 100/100 % - - 100 %								
							1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.894.605.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
							1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.271.639,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	- 100 %								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	709.615.639,00	0,00	0,00	
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	- Nilai Kepuasan Pengunjung Museum	- 81 %											
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	- Jumlah Museum yang dikelola	- 2 Museum								
							2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.215.000,00	0,00	0,00	
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita - Net Death Rate (NDR) - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Pengelolaan Krisis Kesehatan - Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas - Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	- 100 % - 13 % - <2 % - 24.5 - 3.95 - - 80 % - 87 - - 93.2 %											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan - Persentase kelurahan STBM	- 100 % - 35,08 %								
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.890.000,00	111.890.000,00	111.890.000,00	
							1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	55 Paket	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.677.000,00	280.677.000,00	280.677.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.810.000,00	134.810.000,00	134.810.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.560.000,00	54.560.000,00	54.560.000,00	
3	1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Janti													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1110 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.880.000,00	42.880.000,00	42.880.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8635 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	151 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	200.000,00	200.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1351 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000,00	400.000,00	400.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.702.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	311 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.104.000,00	32.104.000,00	32.104.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.579.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.045.000,00	43.145.000,00	43.145.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.000,00	500.000,00	500.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.336.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
4	1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Dinoyo													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	791 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.749.000,00	18.549.000,00	18.549.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7343 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	107 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	929 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.518.000,00	124.253.000,00	124.253.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	224 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.140.000,00	164.140.000,00	164.140.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.238.000,00	2.238.000,00	2.238.000,00	
							1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	<5 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.389.000,00	7.389.000,00	7.389.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000,00	7.961.000,00	7.961.000,00	
5	1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Mojolangu													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas	- 87 -											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan balita - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - 100 % - Persentase									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	807 Orang	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	16.020.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10224 Orang	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	976 Orang	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	250.375.000,00	250.375.000,00	250.375.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	2.641.500,00	2.641.500,00	2.641.500,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	219 Orang	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	112.095.500,00	112.095.500,00	112.095.500,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	2.638.000,00	2.638.000,00	2.638.000,00	
							1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	< 5 Orang	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Lowokwaru, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) - Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis - Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut - Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Persentase pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional serta Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (ASMANTOGA) yang ada di Kota Malang - Persentase pemenuhan SPM rumah sakit - Persentase Pengelolaan Pra Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Standar - Persentase Pengelolaan Tanggap Darurat Sesuai Standar - Persentase penyuluhan pada posyandu - Persentase perkantoran										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					pemerintah yang dibina - Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	782 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.620.000,00	57.620.000,00	57.620.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7447 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	933 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.905.000,00	356.905.000,00	356.905.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.451.000,00	3.451.000,00	3.451.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.918.000,00	26.918.000,00	26.918.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.475.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	763.000,00	763.000,00	763.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.488.000,00	4.488.000,00	4.488.000,00	
7	1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Arjuno													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas	- 87 -											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan	- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan	- 100 % - 100 % - 100 %								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan - 100 % pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan balita - 100 % pelayanan kesehatan bayi baru lahir - 100 % pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - 100 % pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) - 100 % pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis - 100 % pelayanan kesehatan pada usia lanjut - 100 % pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - 100 % pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - 100 % pelayanan kesehatan penderita hipertensi - 100 % warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang	- Kota Malang, Klojen, Oro-oro Dowo	43.880.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10164 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	685 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	300.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	387.606.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	5.917.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	139 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	33.951.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	2.961.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	2.248.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	107.000,00	0,00	0,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	5.080.000,00	0,00	0,00	
8	1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Rampal Celaket													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas	- 87 -											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	40.486.000,00	40.486.000,00	40.486.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2463 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	41 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	275.209.000,00	275.209.000,00	275.209.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120 Orang	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	53.042.000,00	53.042.000,00	53.042.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	2.632.000,00	2.632.000,00	2.632.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	7.535.000,00	7.535.000,00	7.535.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Semua Kel/Desa	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	
9	1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bareng													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
							1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	626 Orang	- Kota Malang, Klojen, Bareng	42.340.000,00	42.965.500,00	42.965.500,00	
							1.02.02.2.02.0005	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8904 Orang	- Kota Malang, Klojen, Bareng	600.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	
							1.02.02.2.02.0010	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	83 Orang	- Kota Malang, Klojen, Bareng	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0011	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	749 Orang	- Kota Malang, Klojen, Bareng	9.600.000,00	400.000,00	400.000,00	
							1.02.02.2.02.0015	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Bareng	431.763.000,00	432.300.500,00	432.300.500,00	
							1.02.02.2.02.0016	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Bareng	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
							1.02.02.2.02.0017	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Bareng	6.000.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0020	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Bareng	6.190.750,00	600.000,00	2.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0021	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	175 Orang	- Kota Malang, Klojen, Bareng	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Bareng	137.800.250,00	158.691.000,00	158.691.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Bareng	5.923.000,00	5.923.000,00	5.923.000,00	
							1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	- Kota Malang, Klojen, Bareng	1.600.000,00	200.000,00	400.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Bareng	11.512.000,00	11.120.000,00	15.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Bareng	221.000,00	100.000,00	200.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Klojen, Bareng	1.200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.270.000,00	3.229.000,00	3.229.000,00	
10	1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Kedungkandang													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					tuberkulosis - Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut - Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Persentase pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional serta Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (ASMANTOGA) yang ada di Kota Malang - Persentase pemenuhan SPM rumah sakit - Persentase Pengelolaan Pra Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Standar - Persentase Pengelolaan Tanggap Darurat Sesuai Standar - Persentase penyuluhan pada posyandu - Persentase perkantoran pemerintah yang dibina - Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	920 Orang	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	56.960.000,00	57.000.000,00	58.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8043 Orang	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	127 Orang	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1137 Orang	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	248.516.000,00	248.000.000,00	250.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	2.812.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	2.105.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00	
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	264 Orang	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	69.339.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	2.896.000,00	2.896.000,00	2.896.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	2.968.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	2.746.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
11	1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Gribig													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1202 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.880.000,00	22.880.000,00	22.900.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10883 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	400.000,00	500.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.155.000,00	452.155.000,00	452.300.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.089.000,00	56.089.000,00	56.900.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.936.000,00	4.936.000,00	4.940.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.340.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					<ul style="list-style-type: none"> pelayanan kesehatan pada usia lanjut - Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	817 Orang	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	19.400.000,00	19.400.000,00	20.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7724 Orang	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1006 Orang	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	600.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	327.006.000,00	147.500.000,00	15.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	800.000,00	800.000,00	800.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	1.522.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	1.994.000,00	1.994.000,00	1.994.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	35.030.000,00	35.030.000,00	35.030.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	1.053.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	5.848.000,00	5.848.000,00	5.848.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	200.000,00	300.000,00	500.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Kedungkandang, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					kesehatan pada usia lanjut - Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi - Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	961 Orang	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	27.120.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9900 Orang	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	4.100.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1146 Orang	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	287.109.000,00	116.580.000,00	116.580.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	1.657.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	66.386.000,00	66.386.000,00	66.386.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	3.949.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	2.868.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0 0	- Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	3.697.500,00	3.897.500,00	3.897.500,00	
14	1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Ciptomulyo													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758 Orang	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6131 Orang	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	106 Orang	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	929 Orang	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	504.123.000,00	504.123.000,00	504.123.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	360 Orang	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.710.000,00	108.710.000,00	108.710.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	13.588.000,00	13.588.000,00	13.588.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	- Kota Malang, Sukun, Semua Kel/Desa	7.244.000,00	7.244.000,00	7.244.000,00	
15	1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Kendalkerep													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas	- 87 -											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan balita - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - 100 %									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	949 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	68.670.000,00	68.670.000,00	68.670.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6640 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	129 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1162 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	437.323.000,00	437.323.000,00	437.323.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	5.108.000,00	5.108.000,00	5.108.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	265 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	160.110.000,00	160.110.000,00	160.110.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	3.949.000,00	3.949.000,00	3.949.000,00	
							1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	6.965.000,00	6.965.000,00	6.965.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	488.000,00	488.000,00	488.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	4.226.000,00	4.226.000,00	4.226.000,00	
16	1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pandanwangi													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas	- 87 -											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan balita - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis - 100 %	- 100 % - 100 %								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					<ul style="list-style-type: none"> peayanan kesehatan pada usia lanjut - Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 									
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.440.000,00	81.440.000,00	81.440.000,00	
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5776 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	748 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.776.000,00	333.776.000,00	333.776.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.612.000,00	6.612.000,00	6.612.000,00	
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5455 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.103.000,00	61.103.000,00	61.103.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.281.000,00	8.281.000,00	8.281.000,00	
							1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	<5 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.148.000,00	3.148.000,00	3.148.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.506.000,00	4.506.000,00	4.506.000,00	
17	1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Polowijen													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Nilai capaian penilaian kinerja puskesmas	- 87 -											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan balita - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - 100 % - Persentase pelayanan kesehatan orang	- 100 % - 100 %								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
					dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) - Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis - Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut - Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi - Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
						1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	574 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	43.610.000,00	43.610.000,00	43.610.000,00		
						1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4608 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	119 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
						1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	297.065.000,00	297.065.000,00	297.065.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	1.332.500,00	1.332.500,00	1.332.500,00	
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5455 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	37.067.500,00	37.067.500,00	37.067.500,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	5.614.000,00	5.614.000,00	5.614.000,00	
							1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	248.000,00	288.000,00	288.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	5.816.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	
18	1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Cisadea													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-								
							1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	517 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	18.848.000,00	18.848.000,00	18.848.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4779 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	69 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
							1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	622 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
							1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	1.357.235.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00	
							1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
							1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
							1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
							1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	124 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
							1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	44.958.000,00	44.958.000,00	44.958.000,00	
							1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	3.949.000,00	3.949.000,00	3.949.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	<5 Orang	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
							1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	8.710.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00	
							1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
							1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Persentase UKBM yang aktif	- 77 %											
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	- Persentase posyandu balita yang mencapai strata tertinggi	- 77,3 %								
							1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	- Kota Malang, Blimbing, Semua Kel/Desa	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	
19	1.06.2.08.2.14.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	- Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	- 75.5 %											
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah data fakir miskin yang tervalidasi	- 1 dokumen								
							1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7000 Keluarga	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.853.960.000,00	2.052.000.000,00	2.052.000.000,00	
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	- TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	- 1.7 %											
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen	- 2 dokumen								
							2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		0	0 0	-	47.838.000,00	0,00	0,00
							2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-											
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-								
							2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.500.000,00	0,00	0,00	
							2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	22 Organisasi	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.750.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.02 P endayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	- Jumlah PLKB yang aktif	- 27 Orang								
							2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	57 Orang	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.380.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab upaten/Kota	- Persentase alat dan obat kontrasepsi yang terfasilitasi	- 100 %								
							2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.300.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	- 7 organisasi								
							2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Kampung	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.225.000,00	0,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	- Persentase Kelompok UPPKS Aktif	- 92.75 %											
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- Jumlah laporan	- 5 laporan								
							2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.640.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
							2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	0,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- Jumlah organisasi yang aktif dan ikut dalam kegiatan	- 10 Organisasi								
							2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.000.000,00	0,00	0,00	
							2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.340.000.000,00	0,00	0,00	
20	2.07.2.18.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	- Persentase Regulasi atas kemudahan investasi yang tersusun	- 80 %											
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabu paten/Kota	- Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi	- 1 Dokumen								
							2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	- Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
J U M L A H										28.538.160.778,00	9.663.547.500,00	9.544.817.500,00		

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.1.1 Perkembangan Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya	6
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Malang.....	19
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota Malang.....	25
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	27
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	27
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	31
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	33
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	33
4.2 Rencana Target Pendapatan Daerah	37
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	40
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	40
5.2 Rencana Belanja Daerah	42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	47
7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	47
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	48
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	49
BAB VIII PENUTUP	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 PDRB Kota Malang Tahun 2018-2023 (miliar rupiah)	6
Gambar 2.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Malang Tahun 2019-2023	8
Gambar 2.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Malang Tahun 2019-2023	9
Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Malang Tahun 2019-2023	10
Gambar 2.5 Inflasi dan Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita Kota Malang Tahun 2019-2023	13
Gambar 2.6 Gini Rasio Kota Malang Tahun 2019-2023	14
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang Tahun 2020-2023	16
Gambar 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang Tahun 2019-2023	17
Gambar 2.9 Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2019-2023	19
Gambar 2.10 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2024-2026	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 PDRB ADHB Kota Malang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	7
Tabel 2.2 Pertumbuhan dan Proporsi PDRB Kota Malang Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023	10
Tabel 2.3 Pertumbuhan dan Proporsi PDRB Kota Malang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023.....	11
Tabel 2.4 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Malang	22
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional.....	27
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2021 - 2023.....	36
Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	37
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2021 - 2023	41
Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	42
Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Sebagaimana amanat dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Walikota menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Rancangan KUA yang disusun memuat:

1. kondisi ekonomi makro daerah;
2. asumsi penyusunan APBD;
3. kebijakan pendapatan daerah;
4. kebijakan belanja daerah;
5. kebijakan pembiayaan daerah; dan
6. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Dokumen RKPD Kota Malang tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2025. Penyusunan RKPD 2025 mengacu Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang Tahun 2025 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang Tahun 2024 - 2026 yaitu:

- a) birokrasi yang partisipatif dan kolaboratif;
- b) daya saing SDM yang kompeten, sehat dan berkarakter;
- c) infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian yang berdaya saing global; dan
- d) menjaga daya beli dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional disebutkan bahwa penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah

diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Guna mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal maka Pemerintah Kota Malang merumuskan tema RKPD Tahun 2024 yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi yaitu sebagai berikut:

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan Menuju Daya Saing Global dan Tata Kelola Pemerintahan Partisipatif Kolaboratif”.

KUA merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun untuk menjaga konsistensi antara APBD dengan RKPD. Untuk mendukung implemetasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD, perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif dan efisien serta akuntabel, pengendalian defisit APBD dan penguatan akses pembiayaan. Selain itu, dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah yang dilaksanakan berbasis elektronik.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Malang tahun anggaran 2025;
2. penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan KEM PPKF tahun 2025;
3. sebagai landasan serta pedoman umum dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
4. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2025;
5. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan KUA Kota Malang Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
24. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
26. Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 12).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

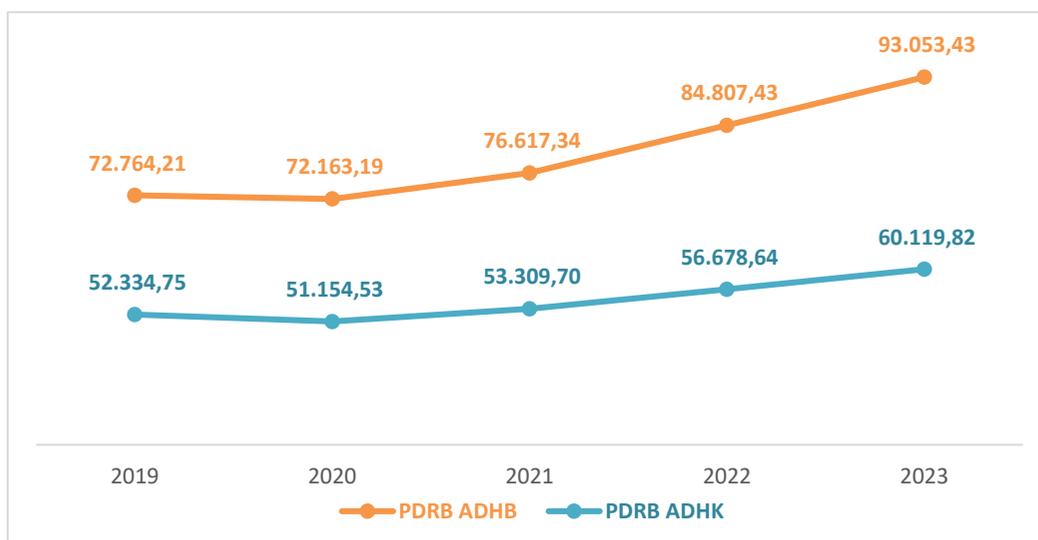
2.1.1 Perkembangan Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator makro ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, *gini ratio*, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan. Indikator makro tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atas adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Berdasarkan cara penghitungannya, PDRB dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis pendekatan yakni PDRB menurut lapangan usaha, PDRB menurut pengeluaran, dan PDRB menurut pendapatan. Dalam mengukur kondisi perekonomian secara makro, PDRB merupakan indikator yang sering digunakan karena dianggap mampu menangkap aktivitas ekonomi di suatu wilayah secara menyeluruh.

Gambar 2.1
PDRB Kota Malang Tahun 2018-2023 (miliar rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Malang tahun 2019-2023 cenderung terus mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2019, PDRB ADHK 2010 Kota Malang mencapai 52.334,75 milyar rupiah meningkat menjadi 60.119,82 milyar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan, PDRB ADHB Tahun 2019 nilainya mencapai 72.764,21 milyar rupiah meningkat menjadi 93.053,43 milyar rupiah pada tahun 2023. Kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian di Kota Malang dapat dilihat melalui PDRB menurut lapangan usaha seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.1
PDRB ADHB Kota Malang Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023

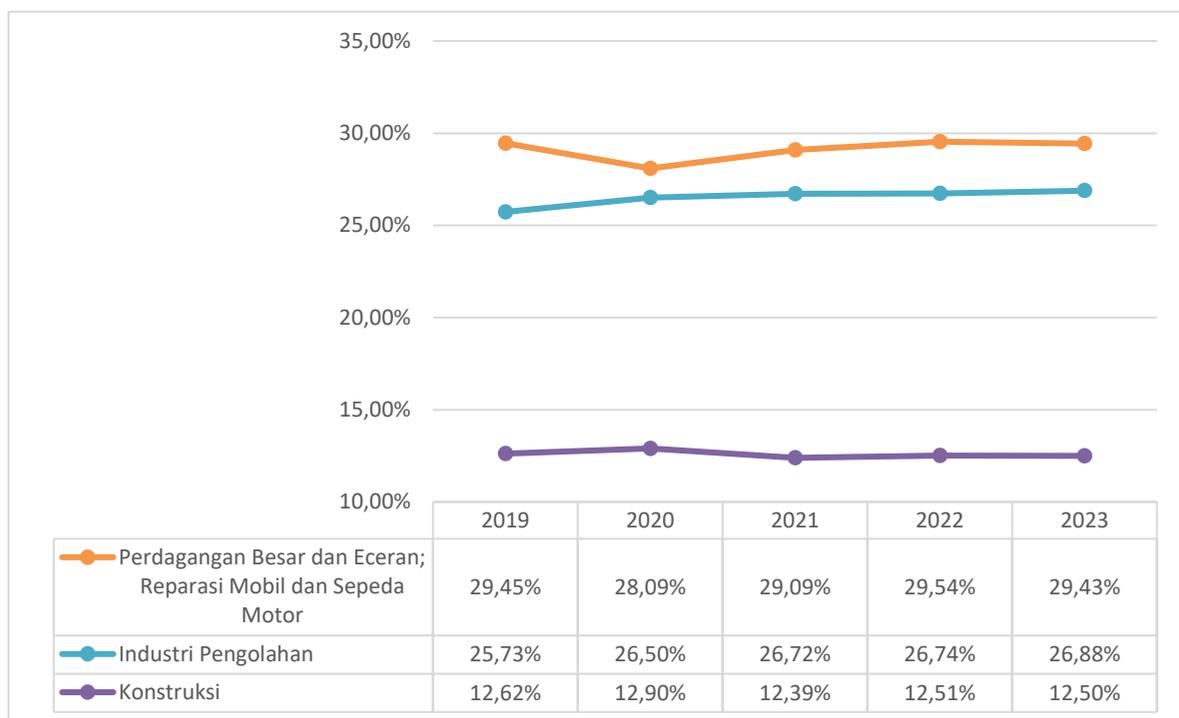
Komponen	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196,01	196,26	198,99	211,80	228,60
Pertambangan dan Penggalian	52,26	51,56	49,84	52,23	57,95
Industri Pengolahan	18.725,71	19.125,49	20.474,31	22.673,96	25.012,72
Pengadaan Listrik dan Gas	24,55	24,93	26,31	28,89	32,32
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	131,46	136,31	146,10	151,37	159,90
Konstruksi	9.179,49	9.310,01	9.490,23	10.613,53	11.634,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.431,77	20.269,35	22.289,69	25.049,06	27.383,38
Transportasi dan Pergudangan	1.899,23	1.650,14	1.783,74	2.216,71	2.699,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.760,26	3.317,65	3.476,16	4.005,72	4.487,11
Informasi dan Komunikasi	2.833,89	3.202,63	3.395,99	3.612,33	3.954,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.068,87	2.132,91	2.200,45	2.443,11	2.642,97
Real Estate	1.054,59	1.087,75	1.125,44	1.170,91	1.215,76
Jasa Perusahaan	594,00	608,07	624,29	661,80	734,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.076,41	1.095,96	1.077,98	1.099,81	1.165,49
Jasa Pendidikan	5.863,78	6.154,06	6.229,10	6.334,70	6.737,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.887,15	2.083,96	2.213,95	2.332,66	2.507,08
Jasa lainnya	1.984,77	1.716,15	1.814,75	2.148,82	2.399,76
PDRB Kota Malang ADHB	72.764,21	72.163,19	76.617,34	84.807,43	93.053,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) sektor yang mendominasi PDRB Kota Malang selama tahun 2019-2023, yakni: (a) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (b) Industri Pengolahan; dan (c) Konstruksi dimana kontribusi dari ketiga sektor tersebut

hampir mencapai 70% dari PDRB Kota Malang. Pada tahun 2023, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Malang dihasilkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 27.383,38 milyar rupiah atau sebesar 29,43%, turun dari 29,54% di tahun 2022. Selanjutnya, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 25.012,72 milyar rupiah atau 26,88%, meningkat dari 26,74% di tahun 2022, disusul oleh sektor Konstruksi sebesar 11.634,69 milyar rupiah atau 12,50%, turun dari 12,51% di tahun 2022.

Gambar 2.2
Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB
Kota Malang Tahun 2019-2023

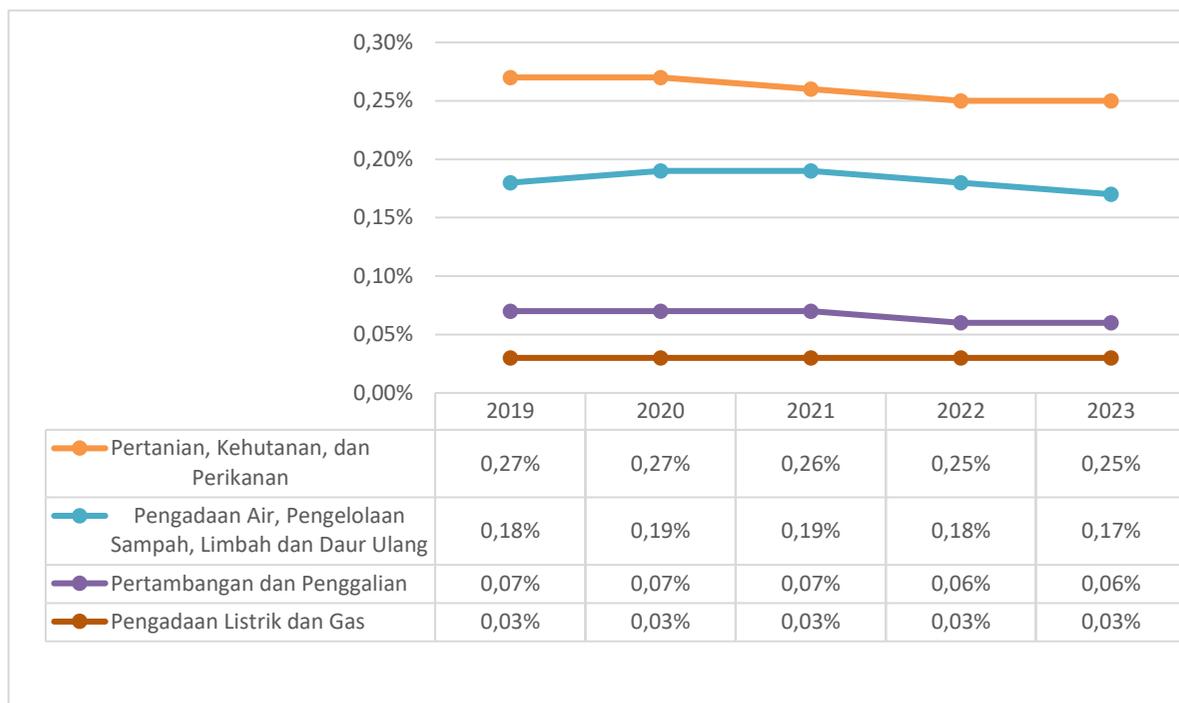


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah terhadap PDRB Kota Malang selama tahun 2018-2022, yaitu: (a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (c) Pertambangan dan Penggalan, serta (d) Pengadaan Listrik dan Gas. Keempat sektor tersebut memiliki kontribusi di bawah 1%. Sebagai salah satu karakteristik wilayah perkotaan, sektor pertanian di Kota Malang memiliki kontribusi kecil dan cenderung mengalami penurunan terhadap PDRB Kota Malang, tahun 2023 kontribusi sektor tersebut yakni 228,60 milyar rupiah atau sebesar 0,25%, sama dengan kontribusi di tahun 2022. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 159,90 miliar rupiah atau 0,17%, turun dari 0,18% tahun 2022. Selanjutnya, Sektor Pertambangan dan Penggalan berkontribusi sebesar 57,95 miliar rupiah atau

0,06%, sama dengan kontribusi di tahun 2022. Disusul dengan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 32,32 miliar rupiah atau 0,03%, sama dengan dengan kontribusi di tahun 2022.

Gambar 2.3
Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB
Kota Malang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pembangunan suatu daerah. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu wilayah secara menyeluruh, karena umumnya perekonomian wilayah maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah berkembang atau tertinggal. Meskipun begitu, bagi perekonomian negara berkembang, pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk melihat seberapa cepat perekonomian negara berkembang mengejar ketertinggalannya dari negara maju.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kota Malang cenderung mengalami tren positif dan hampir selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun Nasional. Terkecuali pada tahun 2020 perekonomian Kota Malang berkontraksi sebesar -2,26% akibat pandemi *Covid-19*. Meskipun begitu, pada Tahun 2021 hingga tahun 2023 perekonomian Kota Malang kembali tumbuh, bahkan mencapai 6,32% dan 6,07% pada tahun 2022 dan 2023.

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Malang
Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Perekonomian di Kota Malang dari sisi pengeluaran didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi PMTDB, dimana pada Tahun 2023, *share* kedua sektor tersebut terhadap PDRB Kota Malang masing-masing sebesar 68,40% dan 35,38%. Kedua sektor tersebut berhasil tumbuh impresif sebesar 5,59% dan 8,94% pada tahun 2023. Adanya pertumbuhan dari segi konsumsi rumah tangga menunjukkan daya beli masyarakat meningkat sehingga permintaan pasar menjadi lebih besar yang menjadi insentif/pendorong bagi investor untuk menanamkan modal. Lebih lanjut, jumlah produksi/output yang dihasilkan oleh perekonomian akan naik setelah menyesuaikan dengan peningkatan dari sisi permintaan.

Tabel 2.2
Pertumbuhan dan Proporsi PDRB Kota Malang
Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023

Komponen	Pertumbuhan (%)			Share (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	2,46	5,52	5,59	67,68	67,59	68,40
Konsumsi LNPRT	13,03	6,02	10,27	0,55	0,54	0,55
Konsumsi Pemerintah	0,31	0,75	3,94	3,14	2,69	2,60
Investasi PMTDB	0,29	8,36	8,94	32,89	32,93	35,38
Perubahan Inventori				0,77	0,79	0,80
Net Ekspor Barang dan Jasa				-5,03	-4,53	-7,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Naiknya penawaran dapat dibuktikan dengan pertumbuhan yang terjadi di seluruh lapangan usaha. Terdapat 2 (dua) sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 10% yakni Transportasi dan Pergudangan (10,76%), dan Pengadaan Listrik dan Gas (10,64%). Kedua sektor tersebut menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2023.

Tabel 2.3
Pertumbuhan dan Proporsi PDRB Kota Malang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

Komponen	Pertumbuhan (%)			Share (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,50	0,97	0,77	0,26	0,25	0,25
Pertambangan dan Penggalian	-2,61	2,84	5,32	0,07	0,06	0,06
Industri Pengolahan	3,05	6,74	6,07	26,72	26,74	26,88
Pengadaan Listrik dan Gas	3,76	7,28	10,64	0,03	0,03	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,60	0,69	3,94	0,19	0,18	0,17
Konstruksi	1,07	6,96	6,44	12,39	12,51	12,50
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,21	6,78	5,61	29,09	29,54	29,43
Transportasi dan Pergudangan	8,01	16,65	10,76	2,33	2,61	2,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,87	11,70	8,80	4,54	4,72	4,82
Informasi dan Komunikasi	5,34	4,42	8,14	4,43	4,26	4,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	2,65	4,09	2,87	2,88	2,84
Real Estate	2,49	3,12	2,77	1,47	1,38	1,31
Jasa Perusahaan	1,88	4,12	8,32	0,81	0,78	0,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,83	0,56	1,15	1,41	1,30	1,25
Jasa Pendidikan	0,30	0,46	4,73	8,13	7,47	7,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,45	1,60	4,57	2,89	2,75	2,69
Jasa lainnya	2,79	13,39	7,19	2,37	2,53	2,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

c. Stunting

Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari rata-rata untuk usianya. Penyebab stunting antara lain :

1. Asupan gizi yang kurang pada ibu selama kehamilan atau pada anak saat sedang dalam masa pertumbuhan
2. Infeksi yang berulang
3. Stimulasi psikososial yang tidak memadai
4. Pola asuh yang salah
5. Sanitasi lingkungan tempat tinggal yang buruk
6. Keterbatasan akses fasilitas kesehatan

Namun, dalam upaya pencegahan stunting, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat
2. Mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun
3. Memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan
4. Mengusahakan anak mendapatkan imunisasi lengkap

Angka prevalensi Stunting di Kota Malang pada tahun 2021 hingga 2023 cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2021 angka prevalensi stunting berada pada 25,7%, pada tahun 2022 menurun menjadi 18%, dan kembali menurun pada 2023 menjadi 17,3%. Angka tersebut masih diatas target nasional yang berada pada 14%. Pemerintah Kota Malang dalam hal penekanan angka prevalensi Stunting yang ditargetkan berada pada angka 12% pada tahun 2025 berupaya melalui berbagai inovasi, edukasi, perbaikan infrastruktur dan beberapa hal yang menunjang dalam intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara terpadu dan berkelanjutan.

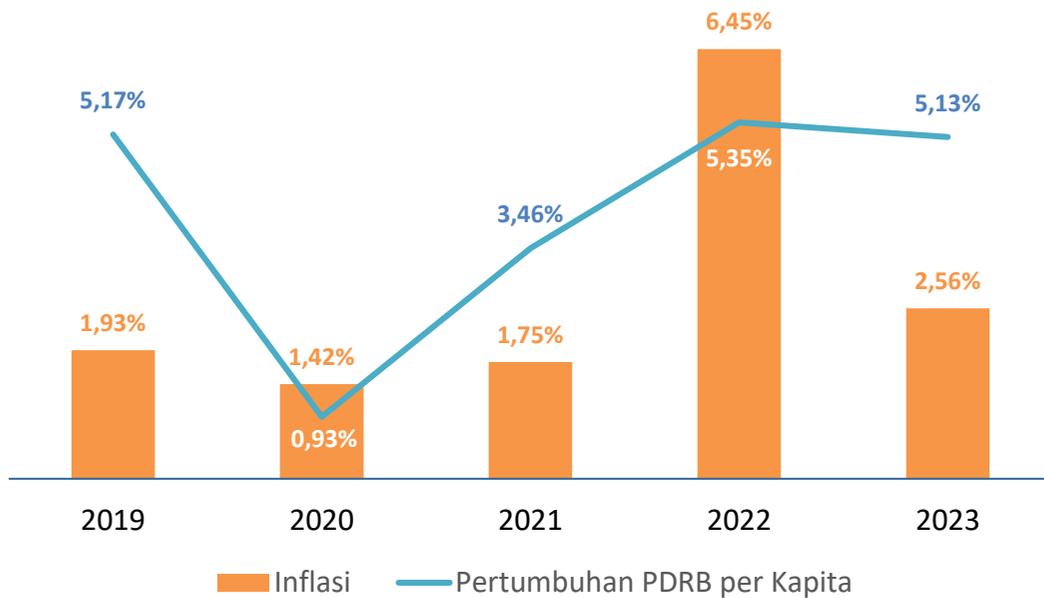
d. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada periode waktu tertentu, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi yang tinggi akan jadi bencana bagi perekonomian karena berarti masyarakat harus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding periode sebelumnya untuk suatu barang yang sama. Namun, inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik bagi perekonomian karena dari sisi penawaran harga di pasar yang cenderung stabil tidak mampu mendorong total output yang dihasilkan.

Inflasi di Kota Malang pada tahun 2019 dan 2020 cenderung mengalami penurunan dari 1,93% menjadi 1,42%. Akan tetapi pada tahun 2021 inflasi sudah kembali mengalami peningkatan menjadi 1,75%. Meskipun begitu, angka tersebut masih berada di bawah target inflasi nasional yang diharapkan berada pada kisaran 2-4%. Rendahnya inflasi di Kota Malang tidak lain disebabkan oleh pandemi *Covid-19* dan kebijakan PPKM yang bertujuan untuk membatasi

mobilitas masyarakat, sehingga dari sisi permintaan akan cenderung stabil atau bahkan mengalami penurunan.

Gambar 2.5
Inflasi dan Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita
Kota Malang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Pada masa pandemi *Covid-19*, pemerintah diuji dengan kondisi perekonomian yang sedang mengalami kontraksi. Hal ini berdampak besar pada perekonomian masyarakat secara luas, tak terkecuali bagi pelaku usaha. Dapat dilihat pada tahun 2020, pendapatan per kapita mengalami pertumbuhan sebesar 0,93%, sedangkan inflasi mencapai 1,42%, artinya di tengah kondisi pendapatan masyarakat yang lebih rendah mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak karena adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas yang berdampak pada semakin rendahnya kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat di Kota Malang bekerja pada sektor informal yang rentan dalam kondisi seperti ini, sehingga Pemerintah Kota Malang harus melakukan intervensi berupa penyaluran bantuan sosial serta bekerjasama dengan swasta dan sejumlah lembaga penyalur zakat untuk memberi bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021, perekonomian Kota Malang sudah kembali pulih yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan pendapatan per kapita menjadi 3,46% dan inflasi naik diangka 1,75%.

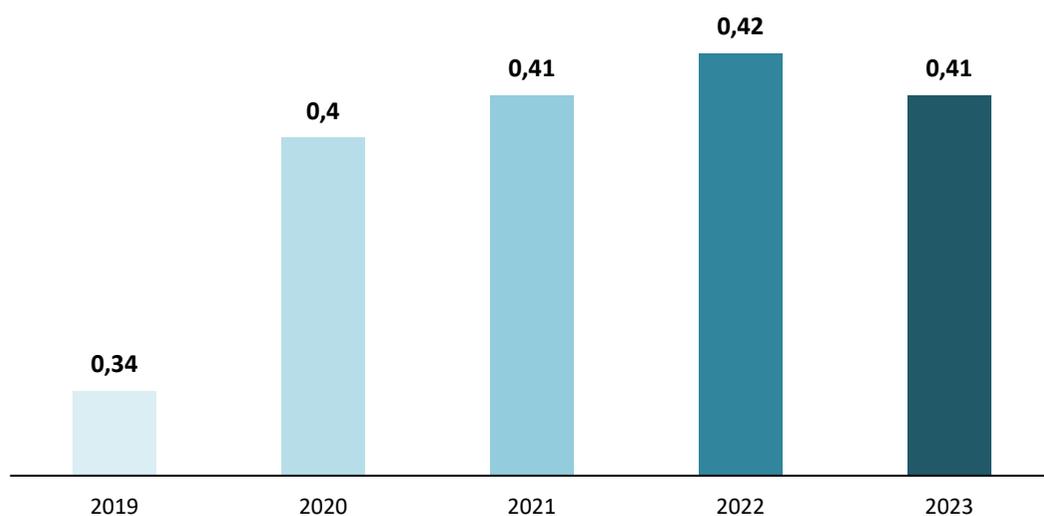
Kembali pulihnya perekonomian Kota Malang di tahun 2022 telah mendorong terjadinya inflasi hingga menyentuh 6,45%. Di sisi lain, pendapatan per kapita hanya tumbuh sebesar 5,35%, sehingga pendapatan riil yang diterima masyarakat pada tahun 2022 sebenarnya mengalami penurunan karena

kenaikan harga lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Malang telah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga tingkat inflasi, diantaranya melalui operasi pasar dan pasar murah, perluasan gerakan *urban farming*, subsidi BBM angkutan umum, diversifikasi pangan pokok non beras, dll. Pada tahun 2023, inflasi Kota Malang mampu dikendalikan dengan nilai 2,56%, sedangkan pertumbuhan pendapatan per kapita mencapai 5,13% yang menunjukkan kembali meningkatnya pendapatan riil masyarakat.

e. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Pembangunan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila perekonomian tumbuh cepat dan terdistribusi secara merata, sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan. Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan adalah *Gini Ratio*. *Gini Ratio* diukur dengan cara membandingkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), semakin mendekati 0 (nol) maka ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Gambar 2.6
Gini Rasio Kota Malang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Secara umum distribusi pendapatan di Kota Malang termasuk dalam tingkat ketimpangan sedang karena *gini ratio* berada pada kisaran 0,4-0,5. Pada tahun 2019, ketimpangan di Kota Malang sudah berada pada tingkatan rendah, tetapi adanya pandemi Covid-19 menyebabkan gini rasio mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 hingga menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Jumlah

pengangguran dan penduduk miskin bertambah banyak, menandakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, sehingga ketimpangan dengan kelompok berpenghasilan tinggi semakin lebar.

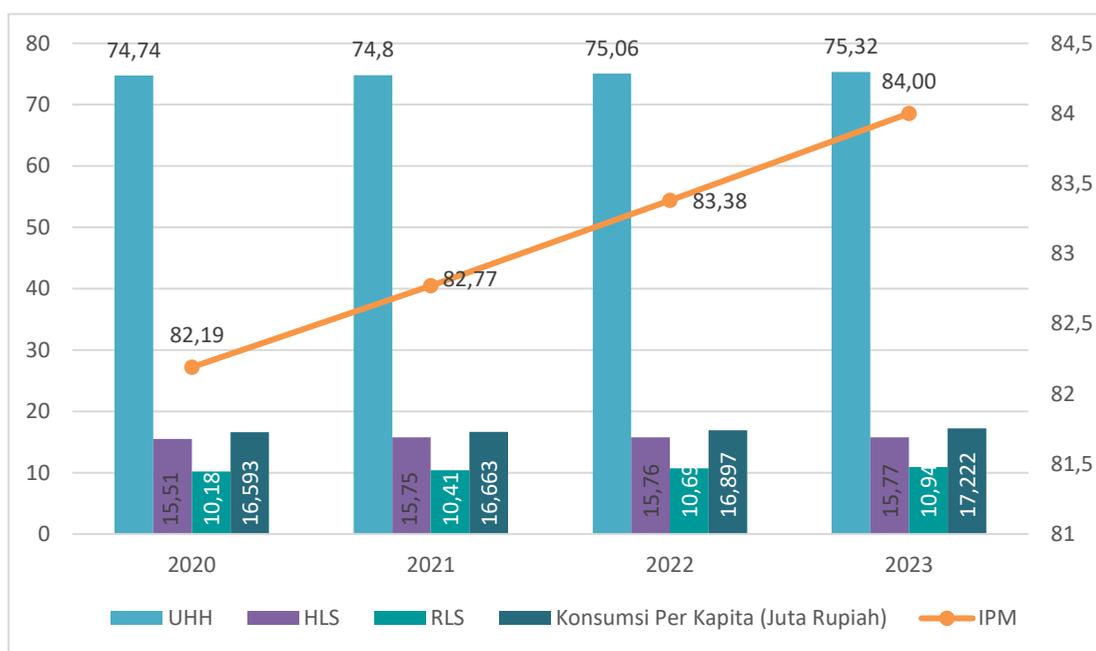
Tingginya inflasi tahun 2022 sebesar 6,45% dan kondisi pasca pandemi menyebabkan perubahan pada pola belanja pada masyarakat. Dimana, masyarakat menengah ke bawah lebih cenderung menyimpan uang atau menahan pengeluaran, sedangkan masyarakat menengah keatas cenderung memiliki pola pengeluaran yang tetap, sehingga terdapat kenaikan pada *gini ratio* menjadi 0,42. Upaya-upaya yang terus dijalankan Pemerintah Kota Malang dalam menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan berdampak pada meningkatnya pendapatan sekaligus pengeluaran masyarakat menengah ke bawah. Pada tahun 2023, *gini ratio* Kota Malang kembali turun menjadi 0,41 dan tidak lagi menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia merupakan faktor terpenting dalam perekonomian, maka dari itu kualitas manusia di suatu wilayah akan sangat berpengaruh terhadap produksi di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri atas 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan untuk dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Malang pada tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 IPM Kota Malang sebesar 82,19, sedangkan pada tahun 2023 telah meningkat menjadi 84,00. Hal ini dikarenakan seluruh komponen yang dihitung dalam IPM juga terus mengalami peningkatan. Kecuali pada tahun 2020, pengeluaran per kapita sedikit mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*.

Gambar 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang
Tahun 2020-2023



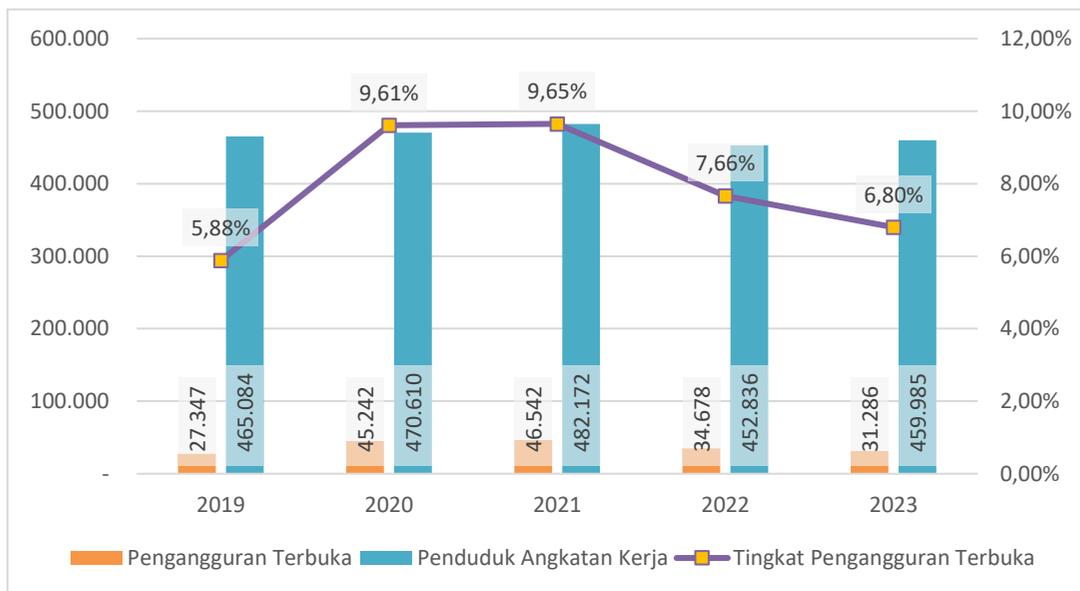
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang tergolong baik dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia sangat penting bagi Kota Malang karena memang yang menjadi keunggulan di Kota Malang adalah Sumber Daya Manusia bukan Sumber Daya Alamnya. Dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak bibit unggul penggerak roda perekonomian. Lebih lanjut, pembangunan manusia yang berjalan baik, nantinya akan mempengaruhi pembangunan ekonomi secara masif.

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu masalah utama wilayah perkotaan adalah tingginya angka pengangguran terbuka di wilayah tersebut. Adanya kecenderungan pendapatan yang lebih tinggi serta jumlah lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak di wilayah perkotaan, mampu menarik perhatian penduduk daerah lain untuk mencari pekerjaan di wilayah perkotaan. Seringkali, pertumbuhan penduduk angkatan kerja tidak diikuti oleh pertumbuhan dari sisi lapangan kerja. Hal inilah yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi.

Gambar 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang
Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, sudah diterima tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak akan mendapat pekerjaan/putus asa (*discourage works*). Pada tahun 2019 pengangguran terbuka di Kota Malang relatif rendah untuk kawasan perkotaan yakni sebesar 5,88%. Pada tahun 2020, pandemi *Covid-19* melanda Indonesia menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 9,61%.

Jumlah penduduk menganggur di tahun 2020 bertambah menjadi 45.242 jiwa, dimana 18.528 orang diantaranya menganggur karena dampak dari pandemi *Covid-19*. Bahkan, apabila jumlah penduduk yang tidak lagi masuk ke dalam angkatan kerja, sementara tidak bekerja, dan mengalami pengurangan jam kerja juga ikut diperhitungkan, maka secara total terdapat 141.122 orang penduduk yang terdampak *Covid-19* pada tahun 2020. Perekonomian pada tahun 2021 kembali pulih, jumlah pengangguran akibat *Covid-19* juga telah mengalami penurunan sebanyak 9.037 orang, artinya 50% penduduk yang menganggur akibat *Covid-19* telah kembali bekerja. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang tidak mengalami penurunan, justru meningkat menjadi 9,65%.

Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023, jumlah penduduk menganggur turun menjadi 34.678 orang dan 31.286 orang. Sehingga, tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang juga mengalami penurunan menjadi 7,07% di tahun 2022 dan 6,80% di tahun 2023. Adapun salah satu faktor pendorong keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui keberpihakan pada UMKM dengan cara mengoptimalkan kebijakan belanja produk UMKM di Jatim Bejo dan katalog lokal serta penerapan kebijakan “*Kemis Mbois*” yang mewajibkan pegawai ASN Kota Malang untuk menggunakan produk-produk UMKM Kota Malang setiap hari Kamis.

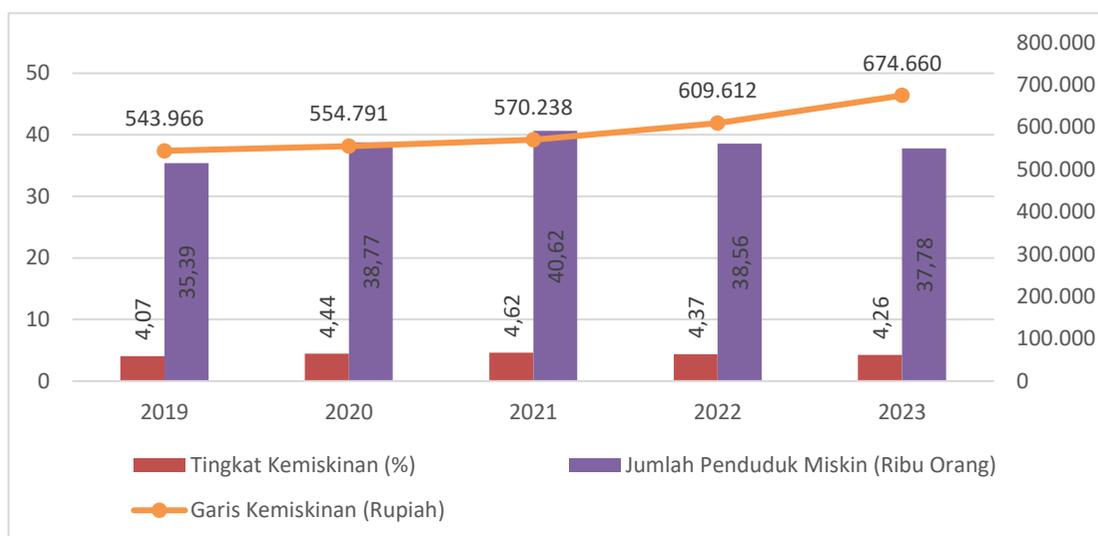
h. Kemiskinan

Masyarakat dapat dikatakan miskin apabila tidak mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dengan konsep ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kota Malang merupakan yang terendah kedua di Jawa Timur. Pada tahun 2019-2023 angka kemiskinan Kota Malang berada pada kisaran 4-5% dari jumlah penduduk. Angka kemiskinan di Kota Malang terus mengalami penurunan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Akan tetapi, pada tahun 2020, angka penduduk di Kota Malang mengalami kenaikan yang pertama kali dalam satu dekade terakhir akibat pandemi *Covid-19*.

Kenaikan angka kemiskinan menunjukkan semakin banyak penduduk miskin di Kota Malang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun 2020, penduduk miskin di Kota Malang bertambah menjadi 38,77 ribu orang atau naik 3,38 ribu orang dibanding tahun 2019. Sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang masuk dalam kategori kemiskinan kronis dan penyumbang kenaikan kemiskinan terbesar adalah masyarakat pada kategori miskin sementara.

Gambar 2.9
Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Peningkatan angka kemiskinan disebabkan oleh turunnya sebagian pendapatan masyarakat akibat pandemi *Covid-19*, sehingga pengeluarannya juga lebih sedikit dibanding sebelumnya. Disisi lain, garis kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun yang berarti rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat terus bertambah, menyebabkan semakin banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan, pada tahun 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Malang mengalami perubahan sebesar 0,11 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,87. Artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh di bawah garis kemiskinan.

Meningkatnya aktivitas ekonomi yang disertai dengan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita menyebabkan peningkatan pada garis kemiskinan menjadi 674.660 rupiah pada tahun 2023. Namun, dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diikuti dengan peningkatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat rentan telah berhasil menurunkan penduduk miskin menjadi 37,78 ribu orang. Sehingga, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan turun menjadi 4,26%.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Malang

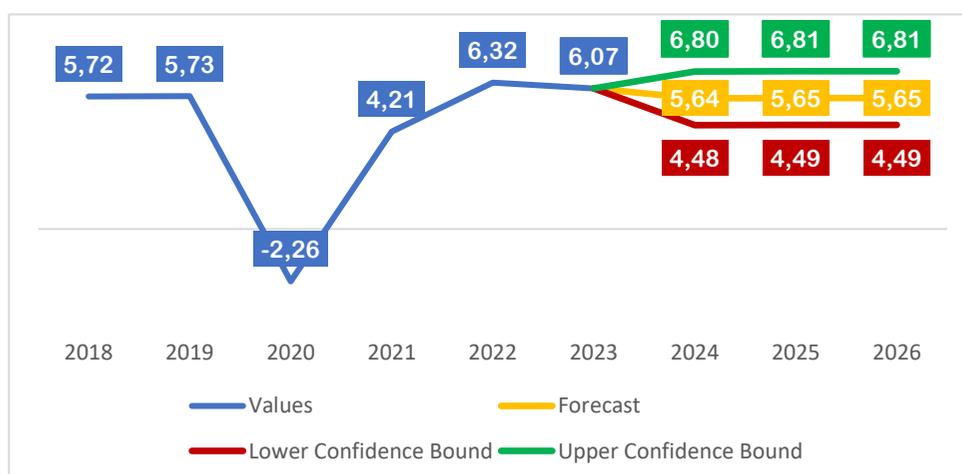
Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi *Covid-19*, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1% pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7%, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3% pada tahun 2022.

Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05%, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 disebutkan bahwa aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (*yoy*).

Dalam rangka memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2024-2026 digunakan metode *forecast* sederhana dengan tiga asumsi yang terdiri dari *Lower Confidence Bound* (Pesimis) yang berkisar antara 4,48-4,49%, *Forecast* (Moderat) yang berkisar antara 5,64%-5,65% dan *Upper Confidence Bound* (Optimis) yang berkisar antara 6,80%-6,81%. Berdasarkan kondisi beberapa tahun terakhir yang banyak terjadi *shock* maupun insentif terhadap perekonomian secara dinamis dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka asumsi proyeksi *forecast* (moderat) lebih relevan untuk digunakan dan asumsi tersebut juga telah memenuhi target pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 yakni sebesar 5%-5,55%.

Gambar 2.10
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang
Tahun 2024-2026



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024, data diolah

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi dan target pertumbuhan ekonomi meliputi:

- Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk *start-up* ekonomi kreatif dan pemanfaatan digitalisasi;
- Inovasi peningkatan daya saing melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dari hulu ke hilir;
- Peningkatan daya saing produk dalam negeri melalui pengembangan sistem pemasaran yang *up to date*;
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah; dan
- Peningkatan kualitas infrastruktur.

Arah Kebijakan Kota Malang tahun 2025 sebagai tahun kedua RPD Kota Malang Tahun 2024-2026 akan difokuskan pada (a) birokrasi yang partisipatif dan kolaboratif; (b) daya saing SDM yang kompeten, sehat, dan berkarakter; (c) infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian yang berdaya saing global; serta (d) menjaga daya beli dan perlindungan nasional.

Arah kebijakan ekonomi disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang memiliki potensi mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Malang. Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2025 dijelaskan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Malang

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
PN 5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	(PP 2) Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
Program Pengembangan Ekspor			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
PN 6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	(PP 7) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Program Pengembangan UMKM
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
PN 4. Memperkuat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	(PP 3) Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
			Program Pengendalian Penduduk
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Program Riset dan Inovasi Daerah
PN 6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	(PP 1) Pengentasan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial
			Program Penanganan Bencana
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	(PP 5) Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Program Pembinaan Perpustakaan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
PN 5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	(PP 2) Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	(PP 6) Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	(PP 5) Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	(PP 9) Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pengelolaan Permuseuman
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	(PP 4) Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
PN 8. Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	(PP 9) Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Program Pendaftaran Penduduk			
Program Pencatatan Sipil			
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
Program Pengelolaan Keuangan Daerah			
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Program Penyelenggaraan Pengawasan			
Program Kepegawaian Daerah			
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
Program Pengelolaan Arsip			
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Program Pengelolaan Profil Kependudukan			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
Program Perekonomian dan Pembangunan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah
			Daerah Kabupaten/Kota
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota Malang

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, serta merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah serta penyempurnaan program pembangunan. Keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah dan mengikuti peraturan menteri serta undang-undang APBN yang ditetapkan setiap tahun, dan APBD yang disinkronkan serta dikelola secara sistematis.

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan, dibutuhkan kemampuan keuangan daerah yang cukup. Analisa atau perhitungan yang tepat menjadi hal yang penting untuk mengoptimalkan keuangan daerah yang dimiliki, sehingga penentuan kebijakan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien. Arah kebijakan keuangan daerah Kota Malang tahun 2025 berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Walikota Malang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Biaya; dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 diproyeksikan mencapai 5,2% berdasarkan APBN 2024 yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Sementara untuk inflasi diproyeksikan sebesar 2,8% dan nilai tukar rupiah sebesar 15.000 Rupiah per Dolar AS. Sedangkan, untuk Tahun 2025 Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,6%, inflasi sebesar 1,5-3,5%, dan nilai tukar sebesar 15.000-15.400 Rp/US\$ sesuai dengan RKP Tahun 2025.

Tabel 3.1
 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Komponen	Realisasi		Proyeksi	
	2022*	2023*	2024**	2025***
Pertumbuhan Ekonomi (% _{yoy})	5,31	5,05	5,2	5,3-5,6
Inflasi (% _{yoy})	5,51	2,61	2,8	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	15.731	15.416	15.000	15.000-15.400

Sumber:

*) Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

**) APBN 2024

***) RKP 2025

Pemerintah Indonesia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memilih tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5–3,5 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000–Rp15.400 per US\$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply* termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan *Exporter Tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *realtime*; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6)

intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *market intelligence*, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan global melalui strategi (1) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antar daerah di setiap provinsi; (3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah; (5) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan; (6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antar daerah; (7) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp1.868-Rp1.906 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* diupayakan agar semakin menurun, yakni pada angka 6,3-6,0. Beberapa upaya mendorong peningkatan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi berusaha dalam mendorong Transformasi Ekonomi antara lain (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian *smelter* di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,9–20,0 persen di tahun 2025. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 antara lain (1) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten dan proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat; (2) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (3) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; serta (4) keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong permintaan besi-baja dalam negeri.

Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US\$22,10 miliar. Pemulihan

perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kota Malang tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan paling sedikit pertumbuhan ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
3. Penganggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memperhatikan rata-rata realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2023, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 serta mempertimbangkan potensi pendapatan yang dapat dicapai;
4. Penganggaran pendapatan transfer pemerintah pusat yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis mengacu pada surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 19 September 2024 nomor: S-116/PK/2024 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025;
5. Penganggaran pendapatan transfer pemerintah pusat yang tidak ditentukan penggunaannya mengacu pada surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 19 September 2024 nomor: S-116/PK/2024 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025;
6. Penganggaran pendapatan transfer antar daerah didasarkan pada koordinasi terkait bantuan yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kota Malang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah;
7. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024;
8. Penganggaran belanja dalam rangka penyelarasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2025 dengan

meningkatkan sinergitas kebijakan fiskal Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib, pengendalian dalam kondisi darurat, pemenuhan belanja wajib, pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran;

9. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2024 dan didasarkan pada penghitungan yang rasional.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan keuangan, pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah seperti yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menunjukkan semakin tingginya tingkat kemandirian daerah tersebut. Kebijakan pendapatan daerah dimaksud meliputi:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk memperkuat proses pembangunan, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing karena dari ketiga sumber pendapatan hanya PAD yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan pengelolaan PAD Tahun 2025 terdiri dari:

- a. Optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penataan organisasi dan tata kerja serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah yang profesional dan bermoral;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
- d. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;

- e. *Law enforcement*/ penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
- f. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD dan Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- g. Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- h. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan umum berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Dana Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang memenuhi aspek kepatuhan dalam menyampaikan laporan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dana transfer pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Insentif Fiskal. Kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil ditujukan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus difokuskan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan, Insentif Fiskal merupakan dana transfer untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Insentif Fiskal difokuskan pada peningkatan kinerja Pemerintah Kota Malang dalam rangka peningkatan Insentif Fiskal yang diterima dan digunakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan transfer antar daerah terbagi atas dua jenis meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil provinsi merupakan dana yang disalurkan oleh provinsi ke kabupaten/kota atas pajak yang diterima berdasarkan proporsi tertentu, sehingga pengelolaannya mengikuti peraturan perundang-undangan. Sedangkan, untuk pengelolaan bantuan keuangan provinsi diarahkan pada koordinasi terkait bantuan yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kota Malang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, nantinya difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah dengan Kementerian/ Lembaga pemberi hibah.

Secara umum, Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 2.344.815.945.277,81 meningkat sebesar Rp. 173.062.488.141,96 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, pendapatan daerah tahun 2023 juga meningkat sebesar Rp. 192.460.107.024,94. Berikut rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel. 4.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2021 s.d. 2023

Kode	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2021	Realisasi Pendapatan Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Tahun 2023
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	603.794.666.883,32	718.337.293.395,35	792.120.013.218,17
4.1.01	Pajak daerah	430.226.323.451,91	547.446.866.621,47	610.369.015.650,81
4.1.02	Retribusi daerah	40.823.425.184,98	41.460.096.255,00	49.774.180.383,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	25.974.904.635,15	29.510.003.383,89	30.267.899.526,91
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	106.770.013.611,28	99.920.327.134,99	101.708.917.657,45
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.475.415.827.616,00	1.450.405.048.247,00	1.552.647.976.062,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.219.895.408.927,00	1.204.342.932.628,00	1.255.568.403.441,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.141.106.006.927,00	1.164.294.384.628,00	1.233.407.465.441,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	78.789.402.000,00	40.048.548.000,00	22.160.938.000,00
4.2.02	Dana Perimbangan	255.520.418.689,00	246.062.115.619,00	297.079.572.621,00
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil	242.435.059.689,00	232.954.723.619,00	294.217.582.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13.085.359.000,00	13.107.392.000,00	2.861.990.621,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.145.343.753,55	3.011.115.493,50	47.955.997,64
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	2.548.416.685,75	47.947.248,64
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	73.145.343.753,55	462.698.807,75	8.749,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.152.355.838.252,87	2.171.753.457.135,85	2.344.815.945.277,81

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

4.2 Rencana Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan Rp. 2.365.711.331.721,00 berkurang sebesar (Rp. 1.064.558.862,00) atau (0,04%) jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2024. Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk tiap-tiap jenis pendapatan sebagaimana Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET PENDAPATAN TAHUN 2024	PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	970.521.536.360,00	1.012.808.610.311,00	42.287.073.951,00
4.1.01	Pajak daerah	806.737.000.000,00	840.000.000.000,00	33.263.000.000,00
4.1.02	Retribusi daerah	56.230.018.750,00	63.770.518.750,00	7.540.500.000,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	30.842.842.034,00	32.215.251.561,00	1.372.409.527,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	76.711.675.576,00	76.822.840.000,00	111.164.424,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.396.254.354.223,00	1.352.902.721.410,00	(43.351.632.813,00)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.268.648.264.000,00	1.297.116.370.000,00	28.468.106.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	21.046.971.000,00	7.099.711.000,00	(13.947.260.000,00)
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	128.446.949.000,00	106.959.832.000,00	(23.511.966.200,00)
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	857.570.832.000,00	882.591.002.000,00	25.020.170.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	261.583.512.000,00	300.465.825.000,00	38.882.313.000,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	127.606.090.223,00	55.786.351.410,00	(71.819.738.813,00)
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil	127.606.090.223,00	55.786.351.410,00	(71.819.738.813,00)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.366.775.890.583,00	2.365.711.331.721,00	(1.064.558.862,00)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - RI (SIPD-RI)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 diproyeksikan Rp. 1.012.808.610.311,00 bertambah sebesar Rp. 42.287.073.951,00 atau 4,36% dari target PAD tahun anggaran 2024. Rincian bertambah jenis PAD adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah ditargetkan Rp. 840.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 33.263.000.000,00 atau 4,12% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024;
 - b. Retribusi daerah ditargetkan Rp. 63.770.518.750,00 bertambah sebesar Rp. 7.540.500.000,00 atau 13,41% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan Rp. 32.215.251.561,00 bertambah sebesar Rp. 1.372.409.527,00 atau 4,45% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan Rp. 76.822.840.000,00 bertambah sebesar Rp. 111.164.424,00 atau 0,14% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.
2. Pendapatan transfer tahun 2025 diproyeksikan Rp. 1.352.902.721.410,00 berkurang sebesar (Rp. 43.351.632.813,00) atau (3,10%) dari target pendapatan transfer tahun anggaran 2024. Rincian berkurang jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
- a. Transfer pemerintah pusat ditargetkan Rp. 1.297.116.370.000,00 bertambah sebesar Rp. 28.468.106.000,00 atau 2,24% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Sedangkan rincian proyeksi berdasarkan kelompok pendapatan transfer pemerintah pusat sebagai berikut:
 - Insentif fiskal diproyeksikan sebesar Rp. 7.099.711.000,00 berkurang (Rp. 13.947.260.000,00) atau (66,27%) jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024;
 - Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan sebesar Rp. 106.959.832.000,00 berkurang sebesar (Rp. 23.511.966.200,00) atau (18,30%) jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024;
 - Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sebesar Rp. 882.591.002.000,00 bertambah sebesar Rp. 25.020.170.000,00 atau 2,92% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024; dan
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp. 300.465.825.000,00 bertambah sebesar Rp. 38.882.313.000,00 atau 14,86% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.
 - b. Transfer Antar Daerah pada objek Pendapatan Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp. 55.786.351.410,00 berkurang (Rp. 71.819.738.813,00) atau (56,28%) jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sama dengan tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 0,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga disinkronkan dengan program dan kegiatan dalam rangka penyesuaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2025 di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang.

Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pemerintah telah melakukan perubahan prinsip pendanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dan target yang tercantum pada KEM PPKF tahun 2025 yang akan diberi alokasi anggaran. Hal ini juga akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025 agar belanja yang dilakukan lebih tepat sasaran dan mampu menuntaskan permasalahan yang ada. Adapun kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin keberlangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Memperhatikan dan melaksanakan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional serta penyesuaian target KEM PPKF tahun 2025;
3. Mengacu dan terus mengupayakan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
4. Memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;

5. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah;
6. Mematuhi pelaksanaan penggunaan transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
7. Berpedoman pada standar harga satuan Kota Malang, analisis standar belanja dan/atau standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi guna memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel.

Selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan belanja daerah memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, perkembangan realisasi belanja tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 2.596.706.284.209,93 atau 91,77% dari total anggaran. Adapun rincian realisasi tiap-tiap jenis belanja periode tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023 sebagaimana Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Realisasi Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2021 - 2023

Kode	Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2021	Realisasi Belanja Tahun 2022	Realisasi Belanja Tahun 2023
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.885.305.464.517,46	1.871.107.791.922,33	2.188.051.811.802,93
5.1.01	Belanja Pegawai	832.390.933.139,63	805.321.434.867,47	834.812.187.648,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.660.275.301,83	951.131.825.659,86	1.170.440.753.995,80
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	93.795.096.076,00	102.185.771.395,00	170.582.940.159,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.459.160.000,00	12.468.760.000,00	12.215.930.000,00
5.2	Belanja Modal	295.092.608.923,53	310.828.967.621,00	405.779.018.058,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	45.554.645.072,57	6.381.986.327,00	2.875.454.349,00
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH REALISASI BELANJA DAERAH		2.225.952.718.513,56	2.188.318.745.870,33	2.596.706.284.209,93

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

5.2 Rencana Belanja Daerah

Proyeksi anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 2.531.714.609.000,00 berkurang (1,61%) atau sebesar (Rp. 41.369.973.688,00) jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp. 2.573.084.582.688,00. Adapun rincian proyeksi belanja pada tiap-tiap jenis belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024	PROYEKSI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	2.380.793.183.087,00	2.172.725.844.418,40	(208.067.338.668,60)
5.1.01	Belanja Pegawai	992.252.832.655,00	1.030.560.322.597,22	38.307.489.942,22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.187.164.454.617,00	1.044.985.822.922,18	(142.178.631.694,82)
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	181.243.595.815,00	81.071.298.899,00	(100.172.296.916,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.132.300.000,00	16.108.400.000,00	(4.023.900.000,00)
5.2	Belanja Modal	182.554.168.607,00	244.065.617.166,60	61.511.448.559,60
5.3	Belanja Tidak Terduga	9.737.230.994,00	114.923.147.415,00	105.185.916.421,00
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.573.084.582.688,00	2.531.714.609.000,00	(41.369.973.688,00)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-RI (SIPD-RI)

1. Belanja Operasi tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp. 2.172.725.844.418,40 berkurang sebesar (Rp. 208.067.338.668,60) atau (8,74%) jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Rincian tiap-tiap jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai dianggarkan Rp. 1.030.560.322.597,22 bertambah sebesar Rp. 38.307.489.942,22 atau 3,86% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024;
 - b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp. 1.044.985.822.922,18 berkurang sebesar (Rp. 142.178.631.694,82) atau (11,98%) jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024;

- c. Belanja Bunga diproyeksikan sama dengan tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 0,00;
 - d. Belanja Subsidi diproyeksikan sama dengan tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 0,00;
 - e. Belanja Hibah dianggarkan Rp. 81.071.298.899,00 berkurang sebesar (Rp. 100.172.296.916,00) atau (55,27%) jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp. 16.108.400.000,00 berkurang sebesar (Rp. 4.023.900.000,00) atau (19,99%) jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.
- 2. Belanja Modal dianggarkan Rp. 244.065.617.166,60 bertambah sebesar Rp. 61.511.448.559,60 atau 33,69% jika dibandingkan dengan tahun 2024;
 - 3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp. 114.923.147.415,00 bertambah sebesar Rp. 105.185.916.421,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024;
 - 4. Belanja Transfer pada objek Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan diproyeksikan sama dengan tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 0,00;

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Dalam rangka penganggaran SiLPA harus diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah terus dilakukan guna mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga mampu memberikan manfaat dan layanan yang lebih luas kepada masyarakat. Rincian proyeksi pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PEMBIAYAAN TAHUN 2024	PROYEKSI PEMBIAYAAN TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	211.308.692.105,00	166.003.277.279,00	(45.305.414.826,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	211.308.692.105,00	166.003.277.279,00	(45.305.414.826,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		206.308.692.105,00	166.003.277.279,00	(40.305.414.826,00)

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - RI (SIPD-RI)

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Malang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Terdapat 3 (tiga) BUMD di Kota Malang yang akan memperoleh penyertaan modal diantaranya PT BPR Tugu Artha Sejahtera (Perseroda), Perumda Tugu Aneka Usaha, dan Perumda Air Minum Tugu Tirta. Dengan adanya penyertaan modal terhadap ketiga BUMD ini, diharapkan kedepannya BUMD di Kota Malang dapat terus berkembang dan mampu berkontribusi lebih terhadap pembangunan daerah melalui sistem bagi hasil yang diterapkan;
3. Selain skema pembiayaan di atas, terdapat alternatif pembiayaan pembangunan daerah di luar APBD Kota Malang, yaitu:

a. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema CSR. Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Kota Malang ditempuh melalui penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), perluasan

keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Kota Malang, penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan. Namun demikian, masih ada peluang untuk optimalisasi CSR dalam rangka Pembangunan Daerah.

b. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership (PPP)*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. Secara definisi dapat diartikan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Besaran Pendapatan daerah Kota Malang masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah terus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- b. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pelaksanaan Pembangunan daerah;
- c. Mendorong pemasaran produk-produk asli Kota Malang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan industri maupun UMKM di Kota Malang;
- d. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD;
- e. Mendorong penyelenggaraan pelayanan prima melalui pengembangan kompetensi SDM aparatur, peningkatan sarana dan prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi digitalisasi;
- f. Melakukan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya;
- g. Melakukan upaya untuk mencari alternatif-alternatif pemasukan dari setiap *stakeholder* yang mempengaruhi PAD secara kreatif.

2) Pendapatan Transfer

- a. Melakukan inventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- b. Mendorong perolehan Insentif Fiskal dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain Peningkatan Ekspor, Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur; dan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pemerintah telah melakukan perubahan prinsip pendanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang akan mendapatkan anggaran. Pencapaian kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersumber dari DAK, DAU, DID, DBHCHT, BK Provinsi diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;
- 3) Belanja Daerah diprioritaskan dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Mengedepankan belanja untuk pelaksanaan program-program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kebijakan nasional maupun provinsi.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun 2024 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2024.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Jika dalam proses pembahasan sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada kebijakan umum ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Walikota Malang dan Pimpinan DPRD Kota Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Malang, 15 November 2024



IWAN KURNIAWAN, ST., MM.



Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Malang :
Ketua,
AMITHYA RATNANGGANI SIRRADUHITA, SS

Wakil Ketua,

H. ABDURROHMAN, S.H.

Wakil Ketua,

TRIO AGUS PURWONO, S.TP

Wakil Ketua,

RIMZAH, S.IP.